

Penguatan kerjasama Australian Defence Force–Tentara Nasional Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Multi-Domain Kawasan Indo-Pasifik

Andrew Littlejohn

littlejohn.a@protonmail.com

Universitas Pertahanan

Abstrak. Artikel ini mengkaji kerentanan dalam kerja sama bilateral antara Australian Defence Force (ADF) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tengah meningkatnya ancaman multi-domain di Indo-Pasifik, di mana musuh mengintegrasikan operasi kognitif dengan manuver fisik untuk memampatkan siklus keputusan dan mengeksploitasi asimetri informasi. Berdasarkan wawasan kebijakan, doktrin, dan praktisi, artikel ini mengidentifikasi kesenjangan dalam autentikasi, verifikasi, dan komunikasi informasi yang diperebutkan tanpa mengorbankan kedaulatan atau mengintegrasikan sistem. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan studi kasus komparatif, analisis dokumen, dan wawancara terbatas, studi ini menganalisis faktor-faktor pendorong kerentanan ini melalui kasus-kasus seperti disparitas rekrutmen ISIS dan taktik hibrida Garda Revolusi. Temuan penelitian mengungkapkan tantangan bersama dalam mengelola perang kognitif, dan mengusulkan model tiga pilar yang reversibel: 'Enable Trust' untuk autentikasi aman melalui metode kriptografi; 'Agree on Truth' untuk validasi dwibahasa yang cepat menggunakan standar bersama; dan 'Speak the Truth' untuk komunikasi publik yang dipimpin negara tuan rumah melalui diplomasi pertahanan. Kerangka operasional ini meningkatkan keunggulan keputusan, mengurangi latensi, dan memperkuat stabilitas regional dengan menyelaraskan respons terhadap disinformasi, menawarkan percontohan yang dipimpin praktisi untuk implementasi tanpa komitmen aliansi.

Kata kunci: Ancaman Asimetris, Perang Kognitif, Diplomasi Pertahanan, Keamanan Indo-Pasifik, Operasi Informasi, Multi-Domain, Komunikasi Strategis

Abstract. This article examines vulnerabilities in bilateral cooperation between the Australian Defence Force (ADF) and Tentara Nasional Indonesia (TNI) amid accelerating multi-domain threats in the Indo-Pacific, where adversaries integrate cognitive operations with physical maneuvers to compress decision cycles and exploit information asymmetries. Drawing on policy, doctrine, and practitioner insights, it identifies gaps in authenticating, verifying, and communicating contested information without compromising sovereignty or integrating systems. Using a qualitative, descriptive-analytical approach with comparative case studies, document analysis, and limited interviews, the study analyzes drivers of these vulnerabilities through cases like ISIS recruitment disparities and IRGC hybrid tactics. Findings reveal shared challenges in managing cognitive warfare, proposing a reversible, three-pillar model: 'Enable Trust' for secure authentication via cryptographic methods; 'Agree on Truth' for rapid bilingual validation using shared standards; and 'Speak the Truth' for host-nation-led public communication through defence diplomacy. This operational framework enhances decision advantage, reduces latency, and bolsters regional stability by aligning responses to disinformation, offering practitioner-led pilots for implementation without alliance commitments.

Keywords: Asymmetric Threats, Cognitive Warfare, Defence Diplomacy, Indo-Pacific Security, Information Operations, Multi-Domain, Strategic Communications

1. Pendahuluan

ADF dan TNI telah memiliki sumber daya manusia, kontak, dan ruang politik untuk menutup kesenjangan yang berbahaya dalam ketahanan informasi bilateral. Tujuannya bukanlah untuk merekomendasikan fusi kelembagaan – solusinya mengejar arsitektur bilateral tiga fungsi yang reversibel ('Enable Trust' (autentikasi), 'Agree on Truth' (validasi), 'Speak the Truth' (publikasi)) dengan uji coba yang terukur dan metrik kualitas keputusan. Australia dan Indonesia berada di kawasan Indo-Pasifik yang ditandai dengan persaingan yang semakin ketat, ambiguitas strategis, dan kemunculan ancaman multi-domain yang terus-menerus. Aktor negara dan non-negara mengadaptasi pola mereka untuk melapisi

informasi, siber, maritim, udara, dan manuver darat guna menantang siklus keputusan, postur kekuatan, dan aliansi keamanan. Tujuannya dapat berupa mencapai efek kognitif yang dirancang untuk membebaskan biaya sekaligus menghindari pemicu nyata untuk perang konvensional. Konteks strategis ini menciptakan tekanan militer bagi ADF dan TNI dan menyoroti perbedaan struktural yang mengakar dalam cara kedua lembaga tersebut mencari, mengevaluasi, dan mengoperasionalkan informasi. Kedua negara mengakui perlunya kerja sama yang lebih mendalam. Arah politik terkini menggarisbawahi hal ini. Para pemimpin kami telah sepakat bahwa konsultasi keamanan harus dilakukan secara berkala, substantif, dan mampu mengatasi tantangan yang merugikan kedua negara. Komitmen tersebut mengandaikan gambaran operasional bersama, namun dalam praktiknya mekanisme bilateral saat ini tidak dirancang untuk mengelola ancaman lintas domain yang bergerak cepat, yang memadukan manuver fisik dengan efek kognitif non-fisik. Ketiadaan metode tepercaya untuk mengautentikasi informasi, memverifikasi klaim dalam kedua bahasa, dan mendukung komunikasi yang kredibel membatasi kemampuan militer kedua negara untuk bertindak tegas ketika keadaan menuntut kejelasan. Artikel ini membahas kesenjangan tersebut. Artikel ini mengkaji bagaimana fondasi untuk kerja sama yang lebih kuat sudah ada tetapi masih kurang dimanfaatkan. Kedua militer berlatih bersama, bertukar perwira, dan melakukan kegiatan terkoordinasi di beberapa domain, namun tidak satu pun dari pengaturan ini yang memiliki fungsi khusus untuk bekerja sama dalam lingkungan informasi yang diperebutkan. Musuh memanfaatkan asimetri hukum, bahasa, dan tempo untuk menghasilkan efek informasi sehingga membentuk persepsi awal dan menciptakan gesekan operasional, menurunkan ketahanan mitra, dan menunda keputusan komandan. Mereka melakukan ini untuk membentuk persepsi awal, menciptakan gesekan administratif, dan sengaja membatasi ruang bagi aksi militer terkoordinasi.

Tujuan studi ini adalah menganalisis faktor-faktor pendorong kerentanan ini dan mengusulkan model praktis yang dapat diimplementasikan tanpa mengorbankan kedaulatan atau mengharuskan integrasi sistem nasional. Fokusnya sempit dan operasional. Studi ini membahas sistem, otoritas, dan alur kerja yang mendasari keunggulan keputusan. Hal ini memperkuat ketahanan operasional, memungkinkan mitigasi ancaman yang lebih cepat tanpa komitmen aliansi. Analisis ini berlandaskan kebijakan, doktrin, dan pengalaman praktisi untuk mengidentifikasi kekurangan pengaturan saat ini dan peluang perbaikan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa ADF dan TNI menghadapi tantangan bersama dalam mengelola elemen informasi dari ancaman multi-domain, tetapi pilihan respons kita dapat diselaraskan melalui langkah-langkah sederhana dan reversibel yang meningkatkan kepercayaan, meningkatkan akurasi dan kecepatan verifikasi, serta mendukung komunikasi publik yang kredibel. Bagian-bagian berikut menguraikan literatur yang relevan, menjelaskan metode yang digunakan, menyajikan temuan empiris, dan membahas implikasi operasionalnya. Artikel ini diakhiri dengan sebuah model yang disusun berdasarkan tiga pilar praktis yang menawarkan jalur yang jelas untuk memperdalam kompleksitas kerja sama kita dan bekerja sama dalam mendukung keamanan regional dalam menghadapi ancaman multi-domain yang terus berkembang.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini mengkaji karya-karya ilmiah dan doktrinal tentang kerja sama militer dalam ancaman multi-domain, khususnya Cognitive Warfare (COGWAR) yang melibatkan disinformasi, media sintetis, dan kampanye naratif di Indo-Pasifik. Topik penelitian – memperkuat hubungan bilateral antara ADF dan TNI dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut – sangat penting di tengah meningkatnya persaingan antarnegara adidaya. Penelitian ini membahas bagaimana musuh mengintegrasikan operasi kognitif dengan tindakan konvensional untuk menunda keputusan, menimbulkan kebingungan, dan mengikis aliansi (Nilsson & Hellström, 2025). Laporan Literasi Digital ASEAN mengidentifikasi bahwa hanya sekitar 25% responden Indonesia yang memiliki kapasitas berpikir kritis tingkat tinggi dalam konteks media digital, sehingga membuat komunitas bahasa Indonesia rentan terhadap disinformasi dan manipulasi (ASEAN Foundation, 2022). Pentingnya penelitian ini terletak pada peningkatan stabilitas regional, penghormatan terhadap kedaulatan, dan penanggulangan ancaman asimetris yang mengeksploitasi ekosistem informasi, seperti yang terlihat dalam insiden Ukraina, Palestina, dan Laut Cina Selatan baru-baru ini.

Penelitian sebelumnya menyoroti persenjataan informasi tetapi kurang fokus pada mekanisme bilateral non-sekutu yang berlaku untuk Indo-Pasifik. Benyamin dkk. (2023) menemukan Indonesia membutuhkan pertahanan siber yang ditingkatkan dan kesiapan multi-domain terhadap ancaman hibrida;

hal ini relevan untuk adaptasi TNI tetapi mengabaikan interoperabilitas kognitif dengan negara mitra, seperti ADF. Bolt (2025) mengungkapkan komunikasi strategis terintegrasi dengan operasi militer untuk efek naratif jangka panjang yang integral dalam konflik kekuatan besar. Brooking & Singer (2018) menunjukkan media sosial semakin mengaburkan batas perang-damai, memungkinkan disinformasi untuk membentuk konflik global dengan jangkauan luar biasa ke hampir semua negara dan komunitas. Kampanye Rusia dan Tiongkok yang digerakkan oleh AI saat ini berupaya untuk memecah aliansi melalui efek multi-domain; mendesak untuk Indo-Pasifik tetapi kurang fokus Asia Tenggara (Bergmanis-Koräts dkk. 2025). Silverman dkk. (2021) mengungkapkan kedekatan dengan peristiwa menciptakan 'natural counter narrative' terhadap misinformasi; Secara operasional bermanfaat untuk validasi ADF-TNI tetapi kurang dieksplorasi secara bilateral. Reuter dkk. (2024) menemukan bahwa tindakan penanggulangan yang berpusat pada pengguna seperti literasi dan deteksi AI dapat menangkal tren disinformasi; mengabaikan aplikasi militer dalam aliansi non-Barat. Kesenjangan utama yang teridentifikasi adalah terbatasnya analisis ancaman kognitif Indo-Pasifik; minimnya mekanisme yang reversibel dan menghormati kedaulatan (karena sebagian besar penelitian berasal dari negara-negara NATO atau Sekutu); dan integrasi OSINT yang kurang dieksplorasi dalam militer non-sekutu.

Kerangka teori ini menggunakan struktur hierarkis: Grand Theory (Teori Pertahanan) sebagai fondasi, yang menilai legitimasi dan adaptabilitas kerja sama bilateral melalui undang-undang nasional (misalnya, UU No. 3/2002 Indonesia; Undang-Undang Pertahanan Australia 1903). Teori Tengah (Teori Dominasi Informasi, JP 3-13, 2012) menjembatani dengan menekankan kendali informasi untuk keuntungan pengambilan keputusan, yang diterapkan untuk memfitnah aktivitas informasi. Teori Operasional (Teori Naratif Strategis, Miskimmon dkk., 2013; Teori Kultivasi, Gerbner, 1969) secara langsung memandu analisis, menjelaskan pembentukan naratif dan efek kognitif paparan berulang dalam operasi multi-domain. Studi ini mengisi celah dengan mengusulkan mekanisme praktis dan reversibel untuk interoperabilitas ADF-TNI dalam menangani perang kognitif, dengan membahas pendekatan bilateral yang belum dieksplorasi di Indo-Pasifik. Studi ini menjawab bagaimana negara-negara demokrasi non-sekutu melawan ancaman multi-domain tanpa erosi kedaulatan, yang mendesak di tengah meningkatnya disinformasi (misalnya, insiden zona abu-abu Laut Natuna) yang berisiko menimbulkan ketidakstabilan regional. Kontribusi meliputi uji coba berbasis bukti, peningkatan ketahanan strategis, dan wacana akademis tentang perang kognitif. Secara konseptual membahas landasan hukum-kelembagaan dengan dominasi informasi dan dinamika kognitif, oleh karena itu penyusunan kerangka kerja sama ADF-TNI dilakukan secara bertahap sebagai 'Enable Trust' (otentikasi), 'Agree on Truth' (validasi), 'Speak the Truth' (publikasi).

3. Metode Penelitian

Kajian ini mengadopsi metodologi kualitatif deskriptif-analitis dengan desain studi kasus komparatif untuk mengkaji kebijakan, doktrin, dan praktik pertahanan antara Indonesia dan Australia dalam mengatasi ancaman multidomain. Subjek penelitian ini antara lain pejabat militer, akademisi, dan pakar kebijakan, serta objek lain seperti dokumen strategis, doktrin, perjanjian bilateral, dan publikasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen undang-undang kunci (misalnya, UU No. 3/2002 dan Undang-Undang Pertahanan Australia 1903), doktrin dan strategi (misalnya, Buku Putih Pertahanan dan Strategi Pertahanan Nasional), serta transkrip pidato (misalnya, dari Presiden RI dan MENHAN); wawancara semi-terstruktur terbatas dengan pakar pertahanan; dan sumber sekunder dari penelitian sebelumnya, jurnal, dan laporan lembaga pemikir. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, tinjauan sejawat, dan jejak audit. Metode tambahan yang disimpulkan, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, mencakup analisis media sosial (misalnya, X posting tentang insiden disinformasi, dirujuk melalui xAI 2025) dan rekonstruksi peristiwa kronologis untuk menilai ancaman naratif.

4. Hasil dan Pembahasan

Studi kasus empiris menggambarkan beberapa dinamika COGWAR sebagaimana dialami melalui peristiwa dunia nyata. Satu kasus menyoroti kampanye propaganda ISIS yang ditargetkan dari tahun 2014 hingga 2017, yang secara tidak proporsional berhasil merekrut warga Australia dengan tingkat yang jauh

lebih tinggi daripada rekan-rekan Indonesia. Kesenjangan ini dikaitkan dengan narasi ISIS yang disesuaikan secara budaya dan bahasa yang ditujukan untuk diaspora Muslim Barat, mengeksploitasi jaringan rekan digital dan narasi identitas untuk mendorong perekrutan dan radikalisasi, sementara Indonesia melawan pengaruh ISIS secara lebih efektif melalui pendidikan agama masyarakat dan interdiksi dini. Dalam studi kasus mengenai Korps Garda Revolusi Iran (IRGC), membahas bagaimana taktik hibrida yang canggih digunakan selama periode 2024-2025, yang berpuncak pada serangan bom bakar yang mengganggu secara politik dan sosial di situs-situs Yahudi di Australia, yang diatur secara diam-diam melalui Kedutaan Besar Iran ke jaringan proksi berlapis. Garda Revolusi mengeksploitasi ketegangan seputar Israel dan Hamas untuk memicu perpecahan di Australia dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga Australia (misalnya, Kepolisian dan Dinas Keamanan), yang memperparah dampak kognitif melalui misinformasi yang menggambarkan Australia tidak aman bagi populasi Yahudinya dan dengan demikian memengaruhi dukungan politik publik terhadap Israel. Kasus-kasus ini menggarisbawahi operasi kognitif multifaset yang menggabungkan efek kinetik dan non-kinetik yang menargetkan persepsi, kepercayaan, dan kohesi sosial, yang mengungkapkan kebutuhan kritis akan penguatan pertukaran informasi bilateral, proses otentikasi, dan komunikasi terkoordinasi antara ADF dan TNI untuk membantu melawan taktik-taktik permusuhan tersebut secara efektif sambil tetap menghormati kedaulatan nasional.

Enable Trust

Bagian 'Enable Trust' sebagaimana disajikan dimulai dengan sintesis interpretatif dari analisis konten kuantitatif dan data kualitatif di seluruh dokumen kebijakan, pidato resmi, dan wawancara dari Indonesia dan Australia. Hal ini memberikan gambaran yang jelas tentang postur pertahanan yang berkembang di mana keamanan kognitif muncul sebagai dimensi penting di samping prioritas kinetik tradisional. Strategi pertahanan Australia telah mengikuti tren linier menuju prioritas peran non-kinetik untuk militer yang secara eksplisit mengangkat ketahanan siber dan informasi sebagai pilar utama, sementara juga menunjukkan minat yang erat dalam meningkatkannya masalah keamanan kognitif meskipun lintasan historis yang berbeda.

Pembahasan yang bernuansa mengungkapkan bahwa hukum Indonesia mengenai militer dan strategi pertahanan memprioritaskan peran kinetik tradisional untuk militer namun cenderung ke arah peran non-kinetik yang mencakup COG WAR, keamanan informasi, dan komunikasi strategis dalam kerangka kebijakan luar negeri yang menghormati kedaulatan. Analisis pidato publik dari Presiden dan Menteri Pertahanan berfluktuasi di sekitar diskusi yang seimbang tentang ancaman dan peran kinetik dan non-kinetik bagi TNI; Secara bertahap, hal ini cenderung lebih kinetik. Namun, mengingat ini adalah pidato politik dan bukan kebijakan atau strategi, fluktuasi mungkin mencerminkan respons terhadap peristiwa sementara dan menarik bagi khalayak luas yang umumnya hanya memahami 'pertahanan' dalam konteks ancaman dan peran kinetik.

Berdasarkan fondasi ini, diskusi beralih ke kekosongan operasional yang mendesak, yaitu kurangnya mekanisme bilateral yang matang dan terstruktur untuk kerja sama keamanan kognitif. Hal ini tidak hanya deskriptif tetapi dibingkai secara analitis dengan mengadopsi Siklus Penargetan ADF sebagai lensa konseptual, yang menyoroti kontras antara koordinasi multilateral yang lebih lambat dan proses penargetan bilateral latensi rendah yang diusulkan, yang dirancang untuk respons cepat dan hampir seketika terhadap ancaman informasi yang muncul. Penanganan latensi bersifat kualitatif, didasarkan pada analisis tematik praktik komunikasi dan penanganan insiden, menghindari klaim numerik yang tidak didukung, tetapi berfokus pada implikasi penundaan operasional dan defisit kepercayaan. Ini berarti bahwa tanpa menargetkan kerja sama latensi rendah, respons yang diberikan tetap reaktif, menangani ancaman setelah peristiwa tersebut. Jaringan hukum dan kelembagaan yang mendasari kerja sama dibedah secara mendalam. Ketiadaan perjanjian formal untuk berbagi informasi keamanan bilateral muncul sebagai penghambat utama, dengan kebijakan keamanan lintas negara yang mensyaratkan kendali kedaulatan atas komunikasi sensitif, auditabilitas komprehensif, dan standar enkripsi. Kerangka kerja resmi seperti Protective Security Policy Framework (PSPF) Australia dan peraturan Kementerian Pertahanan Indonesia (Permenhan No.21/2023) menjelaskan persyaratan rumit untuk enkripsi dan kendali kelembagaan yang memandu jalur teknologi dan model operasional yang layak. Analisis ini mengungkap paradoks di mana platform komersial informal yang tidak aman mendominasi pertukaran informasi sehari-hari, yang

merepresentasikan kerentanan struktural dalam membangun kepercayaan karena pesan-pesan tersebut mudah dibaca oleh perusahaan, negara, dan peretas. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa beberapa informasi dapat dipertukarkan, tetapi dengan disiplin tertentu.

Teknologi membentuk pilar penting ketiga: tinjauan komparatif AI, fusi data, dan kapabilitas kesadaran situasional menggarisbawahi operasionalisasi Australia yang maju dibandingkan dengan lintasan Indonesia yang lebih terbatas. Penelitian ini menyoroti bagaimana kecerdasan buatan secara fundamental mempercepat penciptaan dan penyebaran materi informasi palsu sintetis – memungkinkan pembuatan narasi palsu, deepfake, dan tiruan persuasif dari sumber yang kredibel secara cepat, murah, dan berskala besar. Algoritma kini mampu memprioritaskan dan menyebarkan konten sensasional dengan jangkauan yang belum pernah terjadi sebelumnya, meningkatkan beban verifikasi bagi para pembela dan mengaburkan atribusi dalam insiden informasi. Laju cepat 'low-latency' ini mengintensifkan tekanan pada otentikasi, karena disinformasi yang digerakkan oleh AI dapat dengan cepat membanjiri saluran validasi tradisional, mengikis kepercayaan, dan mengeksploitasi kerentanan masyarakat. Sebaliknya, integrasi AI dan analitik otomatis juga menawarkan kemampuan bagi para pelaku pertahanan untuk mempercepat deteksi, pelacakan, dan mitigasi dini aktivitas informasi yang berbahaya di seluruh platform dan bahasa. Namun, kesenjangan kapabilitas teknologi antara ADF dan TNI saat ini membatasi respons dan ketahanan kemitraan mereka; sistem terintegrasi Sekutu yang lebih matang di Australia dapat memberikan peringatan waktu nyata dan memungkinkan pemantauan berkelanjutan, sementara adopsi yang tidak selaras dan bertahap di Indonesia membatasi efektivitas bersama. Mempertahankan keterlibatan yang berkelanjutan dan ternormalisasi dengan lingkungan informasi, yang dimungkinkan oleh metode kriptografi modern seperti OpenPGP, oleh karena itu menjadi alat strategis – tidak hanya untuk mengamankan pijakan awal dan kredibel bagi pengaruh naratif, tetapi juga untuk memastikan respons yang cepat, dapat diaudit, dan berdaulat terhadap aktivitas informasi berbahaya yang muncul dalam lingkungan yang diperebutkan.

Agree on Truth

Bagian ini berfokus pada pilar penting 'Agree on Truth' dalam konteks kemungkinan kerja sama ADF-TNI untuk melawan ancaman informasi jahat. Bagian ini dimulai dengan menganalisis Centre of Gravity (COG) dalam ancaman multi-domain di Indo-Pasifik; COG musuh berada dalam jaringan operasi informasi terkoordinasi yang mendominasi narasi regional dengan memanfaatkan penundaan verifikasi dan inkonsistensi terminologi lintas bahasa, dengan kemampuan penting dalam produksi narasi lintas platform dan memadukan sumber tertutup/terbuka. COG sekutu untuk kerja sama ADF-TNI terletak pada kapasitas untuk memanfaatkan hubungan interpersonal dan struktural yang ada guna mengakses para pengambil keputusan dengan cepat dan membentuk konsensus yang dapat diverifikasi tentang kebenaran. Hasilnya, penelitian menunjukkan bahwa hubungan interpersonal dan struktural yang ada harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kecepatan kita dalam memahami suatu masalah, yaitu untuk 'Agree on Truth'; maksudnya di sini adalah jika kita berdua dapat melihat informasi yang sama, kita memerlukan standar bersama untuk menilai materi tersebut dan sampai pada kesimpulan yang sama. Menyorot atau membagikan informasi publik terpilih melalui saluran tepercaya tidak akan diklasifikasikan atau menantang kedaulatan, melainkan akan memastikan kita dapat memahami masalah secara setara dan berbagi perspektif demi kepentingan semua.

Dalam analisis kesenjangan kelembagaan di bawah pilar 'Agree on Truth' untuk kerja sama ADF-TNI, kerentanan inti berasal dari tidak adanya lembaga domain kognitif khusus di Indo-Pasifik, tidak seperti StratComCoE NATO yang memberikan analisis, pelatihan, dan respons terkoordinasi terhadap perang informasi; inisiatif regional yang baru lahir seperti ACICE tidak memiliki doktrin operasional dan struktur bersama, sementara pengecualian Asia Tenggara dari komunikasi strategis Barat menciptakan titik buta dalam pemahaman ancaman kognitif. Baik ADF maupun TNI tidak memiliki unit intelijen atau peringatan dini khusus untuk COGWAR, dengan komando teritorial Indonesia menawarkan potensi yang belum dimanfaatkan untuk ketahanan naratif tetapi terputus dari mekanisme koordinasi dan kurangnya doktrin disinformasi. Kekosongan ini membatasi kesadaran bersama, menghambat analisis sentimen berbasis AI dan pemetaan naratif ISR, dan memungkinkan disinformasi melampaui respons, sehingga mengikis kredibilitas. Temuan utama adalah bahwa standar umum, proses peradilan, dan terminologi dwibahasa merupakan prasyarat penting untuk menutup kesenjangan ini, yang memungkinkan penjemputan bilateral yang sah dari lanskap informasi yang selaras dengan prinsip-prinsip Teori Budidaya.

Dalam analisis komparatif lembaga-lembaga potensial untuk kerja sama perang informasi di bawah pilar 'Agree on the Truth' dalam kemitraan kognitif ADF-TNI, entitas-entitas yang ada – termasuk NATO StratComCoE (perencanaan komunikasi strategis dengan keterbatasan Indo-Pasifik), ASEAN-CCS (ketahanan siber regional tanpa respons naratif taktis), ADMM-Plus EWG-CS (pengembangan SOP multilateral tetapi koordinasi lambat), ACICE (laporan ancaman siber yang kekurangan alat operasional), GEC (pedoman anti-disinformasi dengan utilitas militer terbatas), Five Eyes (fusi intelijen waktu nyata), DD&M UE-ASEAN (dialog kebijakan tanpa mekanisme militer), FPDA (respons krisis yang matang), QUAD (mengembangkan koordinasi strategis), dan AUKUS (kemampuan jangka panjang pada tahap awal) – dievaluasi berdasarkan kriteria kecepatan adjudikasi, kewenangan yang dapat diaudit, standar dwibahasa, dan operasi-operasi yang menjaga kedaulatan yang tidak dirahasiakan. Kerangka kerja Barat memberi Australia akses ke perangkat berbagi, analisis, dan verifikasi intelijen tingkat lanjut, serta lingkungan yang berfokus pada bahasa Inggris dengan keanggotaan yang diperluas di Eropa dan Amerika Utara. Sementara itu, platform ASEAN memberi Indonesia legitimasi regional, jaringan multibahasa, dan kemitraan Asia Tenggara, tetapi kurang memiliki doktrin dan proses peradilan yang cepat. Tumpang tindih jarang terjadi, tetapi dapat menjadi peluang bagi AUS dan IDN untuk memanfaatkan koneksi unik ke sumber informasi, proses, saluran penyebaran, dan aset reputasi yang lebih luas tanpa perlu memperluas keanggotaan. Saat ini, belum ada lembaga yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan akan koordinasi naratif terintegrasi yang tepat waktu, sehingga membutuhkan arsitektur bilateral non-rahasia baru yang menjembatani dunia yang berbeda ini, memfasilitasi penyebaran pesan global kepada beragam audiens, dan meningkatkan konvergensi kebenaran yang dapat diverifikasi sekaligus meningkatkan ketahanan kognitif dan menghormati kedaulatan.

Dalam analisis kendala hukum dan operasional pada pembagian informasi di bawah pilar 'Enable Trust' untuk kerja sama ADF-TNI, bagian ini menyoroti hambatan utama yang berasal dari kurangnya perjanjian pembagian informasi rahasia bilateral, yang mencegah transfer, pengembangan bersama, atau integrasi teknologi sensitif; kebijakan keamanan Australia, termasuk Kerangka Kebijakan Keamanan Protektif (PSPF), mengamankan perlindungan yang setara dan perjanjian bilateral formal untuk merilis materi rahasia, yang saat ini tidak ada di antara kedua negara, sementara platform komunikasi non-rahasia tetap rentan terhadap spoofing dan kurangnya akreditasi untuk lingkungan yang aman. Tantangan tambahan termasuk keterbatasan budaya dan sumber daya yang menghambat kepercayaan operasional sehari-hari, khususnya dalam otentikasi penghubung, pembentukan saluran latensi rendah, dan pelacakan keputusan yang dapat diaudit, yang memperburuk risiko di tengah meningkatnya konflik regional; Kerangka kerja yang ada seperti Perjanjian Kerja Sama Pertahanan Australia-Indonesia 2024 memberikan dasar yang tidak berpihak untuk pertukaran yang tidak rahasia, menekankan saling menghormati kedaulatan dan non-interferensi, tetapi secara eksplisit mengecualikan pembagian data sensitif, dan Latihan Koordinasi Insiden Siber ASEAN (ACICE) memprioritaskan pelaporan insiden siber regional dan pembangunan kepercayaan daripada koordinasi kognitif atau naratif secara real-time, sehingga tidak memiliki standar doktrinal bersama. Interpretasi ini menggarisbawahi bahwa kendala-kendala ini mengalihkan fokus dari penyalarsan kebijakan ke kelayakan operasional dan manajemen risiko, tanpa bukti integrasi doktrinal untuk keamanan kognitif dalam platform seperti ASEAN-CCS atau ADMM-Plus EWG-CS.

Temuan utama menunjukkan bahwa untuk mengatasi hambatan ini tanpa aliansi formal, mekanisme bilateral non-rahasia yang terstruktur berfokus pada standar prosedural dan doktrinal, proses verifikasi dwibahasa, saluran penghubung terotentikasi berlatensi rendah, jalur non-rahasia terdaftar, dan jejak audit yang konsisten untuk pengambilan keputusan sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan yang terverifikasi, meningkatkan ketahanan keamanan kognitif, dan menyalarskan dengan prinsip-prinsip non-blok Indonesia sekaligus menghindari ketergantungan politik atau erosi kedaulatan. Secara keseluruhan, bagian-bagian ini memaparkan pendekatan komprehensif dan multidimensi yang menggabungkan solusi linguistik, hukum, prosedural, dan teknologi untuk memastikan kesepakatan fakta bersama yang tepat waktu dan andal. Kerangka kerja ini penting bagi ADF dan TNI untuk menjaga efektivitas operasional dan kredibilitas strategis dengan memperkuat ketahanan informasi bilateral dan menjaga keunggulan keputusan komandan terhadap dampak informasi yang bersifat adversarial yang berkembang pesat.

Speak the Truth

Dalam bagian 'Speak the Truth' kerja sama ADF-TNI, fokusnya adalah pada pembagian fakta terverifikasi melalui saluran terkoordinasi yang dipimpin negara dan dapat diperiksa oleh siapa pun, menggunakan jaringan yang ada untuk menyebarkan informasi objektif dengan cepat dan adil. Hal ini membantu melawan berita bohong, mendukung upaya pertahanan lainnya, membangun kepercayaan dalam demokrasi, dan menjaga perdamaian tanpa aliansi atau rahasia. Kebutuhan utama setiap solusi adalah memiliki pembicara yang jelas, pesan dwibahasa, pembagian cepat, dan hasil terukur untuk saling memeriksa.

Aliansi seperti 'Five Eyes' kuat dalam hal peringatan cepat dan pembagian rahasia, tetapi tidak dapat mengikutsertakan Indonesia karena keanggotaannya yang tertutup dan kebijakan non-blok Indonesia. Secara keseluruhan, kawasan ini memiliki banyak rencana besar tetapi tidak memiliki cara yang cepat dan terbuka untuk membagikan informasi yang tidak rahasia namun sensitif. Australia menangani tugas cepat dan lambat secara merata melalui jaringannya; kelompok ASEAN Indonesia seperti ADMM-Plus lebih bervariasi dan tertinggal dalam hal kerja sama operasional dan taktis yang cepat dalam isu-isu terkini. Akibatnya, kita membutuhkan perangkat bersama yang sederhana dan non-rahasia yang dibangun berdasarkan kesepakatan saat ini untuk memperbaiki kesenjangan dan menyebarkan fakta terverifikasi dengan baik. Diplomasi pertahanan merupakan pendorong utama pilar 'Speak the Truth' yang diusulkan karena menyediakan kewenangan berbicara yang sah, saluran rilis yang dapat diaudit, dan jalur publikasi dwibahasa yang sah, tidak rahasia, dan dapat dibatalkan. Bagian ini mengutip Strategi Pertahanan Nasional Australia (2024) yang meningkatkan dampak informasi dan kemitraan internasional termasuk interoperabilitas informasi/siber sebagai bagian dari 'deterrence through denial' dan mencatat operasionalisasi prioritas tersebut oleh Australia melalui latihan multinasional dan model tenaga kerja Perang Kognitif dan Informasi (CIW). Bagian ini merujuk pada Rencana Aksi DFAT untuk Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia–Australia (2020–2024) yang mengartikulasikan kerja sama pertahanan dan siber yang terkoordinasi, dengan butir-butir eksplisit tentang ketahanan siber bersama, jaminan informasi, dan respons disinformasi yang memperkuat jalur diplomatik menuju kesiapan non-kinetik, bahkan ketika integrasi doktrinal masih belum lengkap. Di pihak Indonesia, bagian ini menempatkan diplomasi pertahanan dalam kerangka bebas-aktif Indonesia dan Buku Putih Pertahanan (2015), yang dilengkapi dengan panduan menteri selanjutnya. Bagian ini menekankan bahwa praktik di Indonesia mengutamakan otoritas negara tuan rumah, otorisasi politik pusat untuk aktivitas informasi domestik, dan struktur komando teritorial; elemen-elemen ini mengharuskan setiap produk komunikasi bilateral dipimpin oleh negara tuan rumah, tidak dirahasiakan, dan dapat diterima secara politik. Keterlibatan diplomatik diposisikan sebagai mekanisme yang memungkinkan 'Speak the Truth' untuk memperkuat tujuan inti yang tercantum dalam kebijakan pertahanan masing-masing negara.

Strategi Pertahanan Nasional Australia mengidentifikasi keunggulan dalam pengambilan keputusan, ketahanan terhadap disinformasi, dan penguatan kemitraan regional sebagai hal yang esensial untuk mencegah pemaksaan (Departemen Pertahanan Australia, 2024). Postur pertahanan Indonesia, yang diartikulasikan melalui Buku Putih Pertahanan, memprioritaskan kendali kedaulatan, legitimasi politik, dan perlindungan ketahanan nasional di ranah informasi (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Diplomasi pertahanan menyediakan otoritas politik dan ruang koordinasi yang diperlukan bagi kedua militer untuk menyelaraskan pesan faktual tanpa melanggar batas hukum maupun politik negara. Komunikasi publik yang terkoordinasi melalui jalur diplomatik secara langsung memajukan tujuan-tujuan nasional ini. Bagi Australia, hal ini memperkuat transparansi dan kepercayaan regional; bagi Indonesia, hal ini menjaga kendali negara tuan rumah atas narasi domestik sekaligus memungkinkan akses cepat ke informasi terverifikasi. Dalam kedua kasus tersebut, 'Speak the Truth' memperkuat ketahanan nasional dengan memastikan komunikasi yang tepat waktu, kredibel, dan selaras selama ancaman multi-domain, mengurangi peluang narasi yang berseteru untuk membentuk persepsi awal (Departemen Pertahanan Australia, 2024; Kementerian Pertahanan RI, 2015).

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa kerja sama ADF–TNI yang berkelanjutan dalam menghadapi ancaman multi-domain bergantung pada tiga fungsi praktis yang saling memperkuat 'Enable Trust'

(autentikasi dan pertukaran yang aman dan berdaulat), 'Agree on Truth' (pengadilan yang cepat dan dwibahasa untuk menghasilkan satu landasan operasional), dan 'Speak the Truth' (komunikasi publik yang sah dan dipimpin oleh negara tuan rumah) yang diimplementasikan sebagai proses yang dapat dibalik dan diaudit, alih-alih sebagai struktur aliansi formal. Asimetri kelembagaan dalam hukum dan model sipil-militer menciptakan risiko latensi dan legitimasi, sehingga tesis ini menganjurkan percontohan yang dipimpin oleh praktisi dan berpolutik rendah (penghubung pra-otorisasi, uji coba yang terintegrasi dengan latihan, dan rubrik peradilan bilateral) yang menghormati kedaulatan sekaligus membangun jaminan interoperabilitas; interoperabilitas teknologi harus mengikuti keselarasan kognitif dan prosedural, bukan mendahuluinya. Oleh karena itu, pendekatan yang direkomendasikan memprioritaskan mekanisme terukur dan berjangka waktu yang mampu mengubah niat politik menjadi praktik yang akuntabel, memperkuat legitimasi regional, dan membatasi kemampuan musuh untuk mengeksploitasi celah informasi tanpa menciptakan keterikatan aliansi yang mengikat.

Saran

Untuk 'Enable Trust' dalam kerja sama ADF-TNI melawan ancaman multidomain, rekomendasi berfokus pada penciptaan sistem komunikasi terverifikasi yang mampu menahan spoofing melalui verifikasi kunci PGP tatap muka selama pertemuan yang sedang berlangsung, seperti yang dilakukan oleh 'Joint Operations and Exercise Sub-Committee' atau 'High Level Committee', yang menggabungkan pembuatan kunci luring dan pencatatan data menyeluruh untuk keamanan yang lebih baik. Pendekatan ini melibatkan pembentukan koordinasi bilateral untuk mengintegrasikan informasi dan ketahanan terhadap aktivitas disinformasi ke dalam siklus perencanaan militer operasional, memperluas pertukaran non-politik antar praktisi, mengintegrasikan mekanisme ini ke dalam pelatihan bersama dan prosedur operasi standar, serta memulai diskusi resmi untuk mengembangkan perjanjian pendukung atau SOP, dengan menyadari bahwa proses tersebut membutuhkan waktu. Semua ini dilakukan sembari berkoordinasi dengan entitas pertahanan dan urusan luar negeri untuk memastikan visibilitas di forum ASEAN tanpa menyiratkan aliansi.

Dalam rekomendasi untuk 'Agree on Truth', fokus bergeser ke membangun persepsi bersama melalui sistem verifikasi yang cepat, kredibel, dan terdokumentasi setelah otentikasi, memastikan kedua pasukan beroperasi dari satu basis fakta tunggal untuk menghilangkan ambiguitas dalam keputusan lintas domain. Hal ini melibatkan penetapan standar validasi dwibahasa dan saluran verifikasi bilateral cepat untuk operasi dan insiden yang sedang berlangsung, pelaksanaan verifikasi dan adjudikasi lintas sumber yang terstruktur guna menciptakan dasar kebenaran yang dapat diaudit untuk pilihan operasional, penerapan siklus penilaian yang menysasar pusat gravitasi, maksud, dan sistem dalam operasi informasi dan pengaruh, uji coba deteksi disinformasi berbantuan AI dengan pengawasan manusia untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi, serta pemetaan hasil terverifikasi ke kerangka kerja ASEAN/ADMM-Plus sembari memanfaatkan analisis linguistik dan budaya bersama guna mencegah bias interpretatif, yang semuanya menjaga konsistensi regional tanpa implikasi aliansi.

Dalam rekomendasi untuk 'Speak the Truth', fokusnya adalah pada penajakan peluang kerja sama dalam penyebaran informasi terverifikasi melalui saluran resmi, sehingga komunikasi yang disiplin dan tepat waktu dapat menegakkan legitimasi publik dan melawan eksploitasi narasi lawan dari berbagai sudut, bahasa, dan perspektif. Pendekatan ini mencakup penetapan jalur resmi dan otoritas rilis. Buku pedoman/SOP narasi bilateral yang dikembangkan dalam 'Agree on Truth' diujicobakan dan disempurnakan melalui latihan untuk: menetapkan tujuan; mencantumkan masukan yang diperlukan; mencantumkan keluaran; menyatakan kendala/batasan hukum; memberikan satu contoh konkret untuk setiap pilar; dan menyediakan satu metrik keberhasilan kuantitatif. Langkah ini mempersiapkan personel ADF-TNI yang lebih luas dalam proses validasi informasi dan rilis yang konsisten untuk penyampaian pesan publik dan operasional yang selaras; langkah ini menggunakan preferensi komunikasi khusus negara tuan rumah dan saluran lokal. Uji coba praktis awal dapat bertepatan dengan pengerahan kehadiran regional seperti 'Indo-Pacific Endeavour' Australia, yang memungkinkan forum untuk membahas, merencanakan, menyebarluaskan, dan menilai efektivitas pesan balasan yang sensitif terhadap waktu dan pengungkapan perlindungan di bawah otorisasi dinamis untuk respons waktu nyata, dan dengan tujuan jangka panjang untuk menyinkronkan narasi strategis dengan ASEAN/ADMM-Plus untuk meningkatkan ketahanan regional terhadap disinformasi tanpa menyiratkan aliansi.

Dalam rekomendasi, ikuti pendekatan bertahap yang selaras dengan 'Epochs' Strategi Pertahanan Nasional Australia untuk menerapkan saran secara bertahap dan terukur sambil menegaskan kedaulatan dan keberlanjutan, menghindari perubahan kelembagaan yang tiba-tiba. Ini melibatkan Epoch 1 'Enhanced Force-in-Being' (2023–2025) dengan dialog teknis, uji coba validasi dwibahasa, saluran praktisi yang aman, SOP berbagi data terbatas, lokakarya komunikasi tepercaya, dan draf indeks referensi silang doktrin dengan model audit-trail; Epoch 2 'Objective Integrated Force' (2026–2030) yang menampilkan eksperimen bilateral terkontrol, latihan yang memvalidasi ritme penargetan dinamis pada insiden operasi informasi, tinjauan pasca-tindakan yang dapat diaudit, penyempurnaan fungsi koordinasi, pembaruan buku pedoman naratif, dan uji deteksi berbantuan AI; dan Epoch 3 'Future Integrated Force' (2031+) yang melembagakan verifikasi dan adjudikasi dalam kerangka kerja yang ada, menerbitkan buku pedoman naratif dan indeks dwibahasa, serta melakukan penskalaan ke ASEAN/ADMM-Plus. Tata kelola memprioritaskan dokumentasi lengkap untuk auditabilitas di seluruh masukan, verifikasi, keputusan, dan rilis; keselarasan dengan struktur komando nasional tanpa mengesampingkannya; standar etika yang memastikan akurasi, proporsionalitas, dan kepatuhan hukum; serta prinsip-prinsip non-aliansi yang menjaga mekanisme bilateral, sukarela, dan reversibel.

Daftar Pustaka

- Amalia, F. S., Mahroza, J., Halkis, M., Priyanto, P., Purwanto, S., Gunawan, R., ... & David, L. (2024). DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA-AUSTRALIA UNTUK HUMANITARIAN ASSISTANCE AND DISASTER RELIEF (HADR).
- Bass, F.M. (1969) 'A New Product Growth Model for Consumer Durables', *Management Science*, 15(5), pp. 215–227.
- Benyamin, J., Mualim, M. and Duarte, E.P. (2023) 'Force Development Against Irregular and Hybrid Warfare in Indonesia', *Defence and Security Studies*, 4(1), pp. 46–51.
- Bowers, I. (n.d.) *Multi-Domain Operations: An Overview*. Copenhagen: Centre for Joint Operations, Institute for Military Operations.
- Bowers, I. (n.d.) *Multi-Domain Operations: A Window into the Future Operational Environment?* Copenhagen: Centre for Joint Operations, Institute for Military Operations.
- Brooking, E.T. and Singer, P.W. (2018) *LikeWar: The Weaponization of Social Media*. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
- Buzan, B. (1991) *People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. London: Harvester Wheatsheaf.
- Camus, A. (1951) *The Rebel: An Essay on Man in Revolt*. Paris: Gallimard.
- Clausewitz, C. (1832) *On War*. Translated by M. Howard and P. Paret. Princeton: Princeton University Press.
- Commonwealth of Australia (2024) *National Defence Strategy*. Canberra: Department of Defence.
- Cook, S. (2021) *China's Growing Influence in Indonesia*. Freedom House.
- Deppe, C. and Schaal, G.S. (2024) 'Cognitive Warfare: A Conceptual Analysis of the NATO ACT Cognitive Warfare Exploratory Concept', *Frontiers in Big Data*,
- Dixit, A.K. and Pindyck, R.S. (1994) *Investment under Uncertainty*. Princeton: Princeton University Press.
- Dziedzic, S. (2025) Chinese Fighter Jet Drops Flares Near RAAF Aircraft in South China Sea. ABC News, 13 February.
- EurAsian Times (2024) China Publicly Unveils an Undersea Cable Cutter.
- Fasching, J. (2021) 'Strategic Mobility: The Essential Enabler of Military Operations in Great-Power Competition', in *2021 Index of U.S. Military Strength: Essays*. Washington, DC: The Heritage Foundation, pp. 55–63.

-
- Flaherty, N. (2023) Information Operations and Regional Security. Canberra: Australian Strategic Policy Institute.
- Freedom House (2022) China's Global Media Influence: Indonesia
- Gray, C. (2015) The Strategy Bridge: Theory for Practice. Oxford: Oxford University Press.
- Haddad, T. (2020) Indonesia's Natuna Standoff with China. *The Diplomat*, 15 January
- Hermawan, B. (2023) Indonesia Steps Up Defence Relationships but Stays Non-Aligned. *The Strategist*
- Hernández-Benito, D. (2024) 'Damages to Submarine Cables and Pipelines in Times of Peace and War: The Nord Stream Sabotage', *The International Law Journal of Vrije Universiteit Amsterdam*, 16(1).
- Hermansah, F., Mahroza, J., Halkis, M., Prakoso, L. Y., Purwanto, S., Sutanto, R., ... & David, L. (2024). DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA AFGANISTAN DALAM PENYELESAIAN PERDAMAIAN TAHUN 2018-2023.
- Jennings, P. (2023) Subsea Communications Cables: Vital but Vulnerable. *The Strategist*.
- Kang, J. and Jacob, J. (2024) Connecting the Indo-Pacific: The Future of Subsea Cables and Opportunities for Australia. Canberra: Australian Strategic Policy Institute.
- Kearns, G. and Whittaker, J. (2023) Countering Influence Operations in Southeast Asia: Lessons from Regional Narratives. *The Strategist*
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2015) Buku Putih Pertahanan. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2023) Pidato Hari Pertahanan oleh Menhan Prabowo Subianto. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Keohane, R. and Nye, J. (1977) Power and Interdependence: World Politics in Transition. Boston: Little, Brown and Company.
- Lowy Institute (2023) Indo-Pacific Strategic Stability Report 2023. Sydney: Lowy Institute.
- Luttwak, E. (1987) Strategy: The Logic of War and Peace. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Machiavelli, N. (1532) The Prince. Translated by P. Bondanella. London: Penguin Press.
- Marjanović, A. and Smiljanić, D. (2025) 'Cognitive Warfare – The Human Mind as the New Battlefield', *Proceedings of the Defence and Security Conference*, 1(1), pp. 84–114.
- Markowitz, H. (1952) 'Portfolio Selection', *The Journal of Finance*, 7(1), pp. 77–91.
- Marles, R. (2023) Remarks at Shangri-La Dialogue, Singapore. Minister for Defence – Speech Archive.
- Mearsheimer, J. (2001) The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton & Company. Miller, S. (2023) 'Cognitive Warfare: An Ethical Analysis', *Ethics and Information Technology*, 25:46.
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China (2020) Foreign Ministry Spokesperson Geng Shuang's Press Conference, 10 January.
- Miskimmon, A., O'Loughlin, B. and Roselle, L. (2013) Strategic Narratives: Communication Power and the New World Order. New York: Routledge.
- Morelle, M., Cegarra, J., Marion, D. and André, J.-M. (2023) 'Towards a Definition of Cognitive Warfare'. Conference on Artificial Intelligence for Defence, DGA Maîtrise de l'Information, Rennes.
- Morgenthau, H. (1948) Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: Alfred A. Knopf.
- Purwanto, S., Purnomo, M. R., & Budiman, H. (2025). POWER DYNAMICS IN DECISION MAKING: A QUALITATIVE ANALYSIS. *POWER*, 2(1), 80-86.
- Purwanto, S., & Ilhamsyah, I. (2025). Army Human Resources Development Strategy through Human Capital Approach. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 1(1), 1-22.
- Purwanto, S., Basalamah, S., Mallongi, S., & Sukmawati, S. (2020). Effects of Recruitment, Leadership, and Local Culture on Discipline and Performance of Garuda Contingent Soldiers in Lebanon. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(5), 606-618.



-
- Purwanto, S., & Siagian, F. (2025). Strategic human resources management in the global era: Navigating opportunities and challenges. *Centurion MSPD Journal*, 1(1).
- Purwanto, S., Wibowo, A., & Suharti, T. (2023). The OCB Determinant of Employees in Non-Profit Organization; Leadership Role and Work Engagement. *inovator*, 12(2), 251-263.
- Purwanto, S., Hidayatullah, S. S. W., & Tirtoadisuryo, D. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT STRATEGIES FOR ENHANCING ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN THE DIGITAL ERA.
- Prasetiawan, H. P., AR, D. D., & Purwanto, S. (2025). THE STRATEGY TO IMPROVE THE CHARACTER OF MILITARY ACADEMY CADETS THROUGH THE ROLE OF MENTORS IN SHAPING PROFESSIONAL OFFICERS TO SUPPORT THE MAIN DUTIES OF THE INDONESIAN ARMY *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 9(6), 2184-2191.
- NATO Strategic Communications Centre of Excellence (2024) Russian Information Operations Outside of the Western Information Environment
- Sugiyono (2013) Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Kertas Karya Ilmiah Perorangan dan Disertasi. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2013) Metode Penelitian Administrasi R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sun Tzu (5th Century BCE) The Art of War. Translated by S.B. Griffith. Oxford: Oxford University Press.
- Suryokusumo, T. (2017) 'Indonesia Defense University, State Defense & Pancasila', *Wira Journal*, 67(51)
- United States Department of Defense (2012) Joint Publication 3-13: Information Operations. Washington, DC: Joint Chiefs of Staff.
- Walt, S. (1987) The Origins of Alliances. Ithaca: Cornell University Press.
- Watling, J. and Roper, D. (2019) European Allies in US Multi-Domain Operations. London: Royal United Services Institute (RUSI).
- White House (2022) Indo-Pacific Strategy of the United States. Washington, DC: White House.
- Zhou, H. (2019) 'An Introduction of Cognitive Electronic Warfare System', in *Communications, Signal Processing, and Systems*. Singapore: Springer, pp. 1203-1211
- .